



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**

**SEPTEMBER 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nyam sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit di Dinas Sosial Kabupaten Jember kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 sampai dengan September 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 sampai dengan September 2025

Jember, 24 September 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Jember



Akhmad Helmi Luqman, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760507 199602 1 004



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR  | i         |
| DAFTAR ISI.....   | 1         |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....  | 2         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>5</b>  |
| A.    LATAR BELAKANG .....  | 5         |
| B.    MAKSUD DAN TUJUAN.....  | 6         |
| C.    KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS<br>SOSIAL KABUPATEN JEMBER..... | 6         |
| D.    SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER.....                                | 8         |
| E.    SARANA PRASARANA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER .....                                  | 9         |
| F.    ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER.....   | 10        |
| G.    ISU STRATEGIS.....  | 13        |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>                                       | <b>14</b> |
| A.    RENCANA STRATEGIS .....   | 14        |
| B.    INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....  | 16        |
| C.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....  | 19        |
| D.    ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN TAHUN 2024.....   | 21        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | <b>23</b> |
| A.    KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....   | 23        |
| B.    CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER .....                                   | 24        |
| C.    ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN .....                                | 29        |
| D.    ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....  | 53        |
| E.    EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ..                          | 54        |
| F.    REALISASI ANGGARAN.....   | 57        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>62</b> |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Capaian Kinerja SASARAN Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2021– 2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS

Sasaran 3 : Meningkatnya Restorasi Sosial

Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Trget Kinerja Perangkat Daerah

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **tinggi**. Disamping capaian kinerja yang memuaskan, perbaikan tata kelola dan penerapan pelayanan publiknya,. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial berhasil mendapatkan penghargaan antara lain :

- Penghargaan penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 ;
- Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kategori Pelayanan Prima ;

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 57.817.764.115,-, yang dibagi menjadi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.514.163.296,- Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 52.007.610.219,-, dan Belanja Modal sebesar 1.295.990.600,-. Dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 50.695.556.279,- atau 87.52 % dari pagu anggaran. Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan anggaran tidak terserap 100 %, dikarenakan ada beberapa anggaran belanja yang tidak bisa dilaksanakan (kesalahan pada kode rekening dan kendala teknis lainnya).

Kendala atau hambatan yang dialami dalam pelaporan dan pengukuran target –target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain :

- 1). Permasalahan pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial:
  - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan pemberdayaan sosial
  - Kemampuan dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang perlu ditingkatkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial
- 2). Permasalahan pada sasaran Meningkatnya Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  - Data calon penerima bantuan masih belum akurat
  - Belum terlaksananya kegiatan yang mendorong kemandirian dan produktifitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3). Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Restorasi Sosial
  - Kemampuan dan kualitas SDM Non ASN penjaga 15 Taman Makam Pahlawan yang perlu ditingkatkan
  - Minimnya Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan 15 Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Jember
- 4). Permasalahan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
  - Kemampuan dan kualitas SDM karyawan ASN dan Non ASN yang perlu ditingkatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan baik itu rutin maupun program kegiatan prioritas yaitu bantuan dan pelayan sosial bagi PMKS;
  - Perencanaan kegiatan yang masih belum optimal khususnya untuk bantuan dan pelayanan sosial bagi PMKS.

Dan rencana aksi Dinas Sosial Kabupaten Jember atas semua kendala/permasalahan diatas adalah :

- Mengadakan Bimtek/Pelatihan khusus bagi peningkatan SDM PSKS agar lebih optimal dalam membantu penanganan PMKS ;
- Mengadakan Bimtek bagi peningkatan SDM Karyawan ASN dan Non ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember agar lebih optimal dan memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada PMKS ;
- Peningkatan verifikasi dan verifikasi DTKS di 31 Kecamatan ;
- Peningkatan Assesmen calon penerima manfaat dengan turun langsung ke wilayah/door to door;

- Menyusun program kegiatan pelatihan ketrampilan bagi PMKS guna mewujudkan kemandirian PMKS
- Sinergi dengan Stakeholder/OPD terkait agar ikut berperan dalam usaha pemberdayaan guna kemandirian PMKS
- Manajemen anggaran pada TW I s/d IV (monitoring dan evaluasi) juga harus lebih dioptimalkan agar pada tahun yang akan datang realisasi anggaran bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2024.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan di Bidang Sosial
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah
- (3) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Penanganan Bencana, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (6). Uraian Tugas dan Fungsi :
  - a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dan fungsi antara lain :
    1. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
    2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di laporan lingkungan dinas;
    3. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;

4. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
  5. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan fungsi : perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak-anak terlantar yang meliputi perjangkauan, rujukan dan pemantauan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Sosial serta tugas lain, dan fungsi : perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan, koordinasi, monitoring evaluasi, meliputi : kewirausahaan sosial, penyuluh sosial, partisipasi sosial, pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta kesetiakawanan , sosial dan pemeliharaan, rehabilitasi serta pengamanan sarana dan prasarana taman makam pahlawan kabupaten, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - e. Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan bencana alam dan sosial kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dan fungsi : perumusan kebijakan teknis penanganan bencana, pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana , koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana serta taruna siaga bencana, penyelenggaraan penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus kelompok rentan dan LDP, pemberian bimbingan teknis penanganan bencana meliputi bencana alam, bencana sosial, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan LDP.
  - f. UPT Liposos tugas dan fungsi melaksanakan bantuan dan pelayanan sosial pada klien Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional tugas dan fungsi memberikan pelayanan berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Sosial Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 24 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 87 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 65 orang atau 73 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024**

| Jabatan                 | Kebutuhan |          |           |          |           | Bezetting |           |          |          |           |          | L         | P         |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                         | Σ         | SMP      | SMA       | D3       | S1        | S2        | Σ         | SMA      | D3       | S1        | S2       |           |           |
| Jabatan Pimpinan Tinggi | 1         |          |           |          | 1         |           | 1         |          |          | 1         |          | 1         |           |
| Jabatan Administrasi    |           |          |           |          |           |           |           |          |          |           |          |           |           |
| 1. Administrator        | 5         |          |           |          | 3         | 2         | 5         |          |          | 3         | 2        | 4         | 1         |
| 2. Pengawas             | 2         |          |           |          | 2         |           | 2         |          |          | 2         |          | 1         | 1         |
| 3. Pelaksana            | 6         | 3        | 1         | 1        |           |           | 6         | 3        | 1        | 1         |          | 6         |           |
| Jabatan Fungsional      | 9         |          |           |          | 8         | 1         | 9         |          |          | 8         | 1        | 4         | 5         |
| P3K                     | 1         |          |           |          | 1         |           | 1         |          |          | 1         |          |           | 1         |
| Non ASN                 | 64        |          | 39        | 8        | 17        |           |           |          |          |           |          | 52        | 12        |
| Jumlah                  | <b>87</b> | <b>3</b> | <b>40</b> | <b>9</b> | <b>32</b> | <b>3</b>  | <b>24</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>16</b> | <b>3</b> | <b>71</b> | <b>17</b> |

**Sumber :** Data Kepegawaian Dinas Sosial Kab Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Sosial Kabupaten Jember

#### E. SARANA PRASARANA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Sosial Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Tawes 306 Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Sosial Kabupaten Jember cukup memadai, karena sarana prasarana penunjang kegiatan kantor telah tersedia, Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Jember**  
**Per 31 Desember 2024**

| No | Sarana Prasarana                     | Jumlah     | Kondisi      | Jumlah ideal |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1  | Bangunan Gedung Kantor (Liposos)     | 1          | Kurang Layak | 6            |
| 2  | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan     | 1          | Cukup Layak  | 2            |
| 3  | Bangunan Gedung/Garasi               | 1          | Cukup Layak  | 2            |
| 4  | Bangunan Gedung Tempat Ibadah        | 1          | Cukup Layak  | 1            |
| 5  | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 2          | Cukup Layak  | 3            |
| 6  | Laptop                               | 24         | Layak        | 28           |
| 7  | Komputer PC                          | 12         | Layak        | 18           |
| 8  | Printer                              | 23         | Layak        | 25           |
| 9  | CCTV                                 | 6          | Layak        | 12           |
| 10 | Kendaraan Pejabat                    | 4          | Layak        | 4            |
| 11 | Kendaraan Operasional                | 7          | Layak        | 7            |
| 12 | Kendaraan Roda 2                     | 24         | Layak        | 24           |
|    | <b>Jumlah</b>                        | <b>106</b> |              | <b>132</b>   |

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024

Sarana prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan kondisi yang cukup layak, namun tidak halnya dengan sarana prasarana UPT Liposos, sebagai pendukung pelayanan pada klien/PPKS, bangunan rumah singgah/ruang klien kurang memadai, karena kapasitasnya tidak dapat menampung jumlah klien yang over load (hasil razia grobyokan PPKS dll), dan juga belum tersedianya ruang klien untuk ODGJ, Penyakit Menular, Lansia, isolasi ODGJ Ekstrim, ruang Kesehatan dan alat medis penanganan pertama pada klien, rumah singgah, ruang konseling, ambulance, sarpras kebersihan klien, dan artesis.

#### **F. ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 57.923.611.115,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember**  
**Tahun 2024**

| No  | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                   | Anggaran (Rp,-) |
|-----|---|-----------------|
| 1   | <b>Program</b> penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota    | 9.029.033.415,- |
| 1.2 | <b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah            | 4.241.340.296,- |
|     | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.241.340.296,- |
| 1.3 | <b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah                | 664.540.119,-   |

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 76.415.200,-           |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 44.109.400,-           |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Peralatan Rumah Tangga  | 154.136.700,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 320.290.000,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Barang Cetak dan Penggandaan  | 64.587.819,-           |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 5.500.000,-            |
| 1.4      | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | 3.347.568.500,-        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5.550.000,-            |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 263.300.000,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 3.078.718.500,-        |
| 1.5      | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | 775.584.500,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 164.500.000,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 340.000.000,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 45.000.000,-           |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 226.084.500,-          |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>820.205.000,-</b>   |
| 2.1      | <b>Kegiatan</b> Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  | 820.205.000            |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | 274.960.000,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 545.245.000,-          |
| <b>3</b> | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>2.755.653.000,-</b> |
| 3.1      | <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                | 2.383.953.000,-        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Permakanan   |                        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Alat Bantu   | 251.600.000            |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 1.208.573.000,-        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 923.780.000            |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Layanan Kedaruratan   |                        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                               | 371.700.000            |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Permakanan   |                        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 152.820.000,-          |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota   | 218.880.000,-          |
| <b>4</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>33.101.881.700</b>  |
| 4.1      | <b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar  |                        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penjangkauan Anak-Anak Terlantar  |                        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar   |                        |

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| 4.2      | <b>Kegiatan</b> Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | 33.101.881.700,-        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota      | 244.538.400,-           |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga          | 32.778.543.300,-        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat        | 78.800.000,-            |
| <b>5</b> | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   | <b>12.000.000.000,-</b> |
| 5.1      | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota    | 12.000.000.000,-        |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                    | 12.000.000.000,-        |
| <b>6</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                               | <b>216.838.000,-</b>    |
| 6.1      | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota            | 216.838.000,-           |
|          | <b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 216.838.000,-           |
|          | <b>JUMLAH</b>   | <b>57.923.611.115,-</b> |

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kab Jember Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Upaya optimalisasi verifikasi dan validasi data PPKS agar mendapatkan data yang akurat guna ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan dan pelayanan sosial pada PPKS;
2. Upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS di Kabupaten Jember agar PPKS mengalami penurunan secara kuantitas, dan meningkat kemandirian dan kesejahteraanya;
3. Upaya optimalisasi rehabilitasi sosial bagi PPKS di Kabupaten Jember dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya;
4. Upaya pemenuhan sarana prasarana yang memadai pada UPT Liposos dalam optimalisasi pemberian bantuan dan pelayanan pada PPKS/Klien Liposos;
5. Upaya optimalisasi pemberdayaan pada PSKS dengan ditingkatkan kemampuannya dalam membantu penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui Fasilitasi, bimbingan, dan penyediaan sarana dan prasarana Peningkatan kompetensi SDM PSKS ;dan
6. Upaya optimalisasi perbaikan sarana prasarana 15 TMP di Kabupaten Jember agar bisa difungsikan sebagai wisata religi dan edukasi bagi Masyarakat.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029, berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2029. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2025-2029 yaitu: “ DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH MAJU”

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Sosial Kabupaten Jember yaitu

Misi : Mengentaskan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Merata

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan pada PPKS

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas**  
**Sosial Kabupaten Jember**  
**Tahun 2021-2026**

**Tujuan 1** : Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara

Indikator Tujuan : - Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)
- Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN<br>(01)  | TUJUAN<br>(02)   | SASARAN<br>(03)   | INDIKATOR<br>(04)   | BASELINE 2024<br>(05) | TARGET TAHUN |              |              |              |              |              |
|--|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  |   |   |                       | 2025<br>(06) | 2026<br>(07) | 2027<br>(08) | 2028<br>(09) | 2029<br>(10) | 2030<br>(11) |
| - Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius<br>- Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin | Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara |   | Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)                | 10                    | 10.1         | 10.2         | 10.3         | 10.5         | 10.8         | 11           |
|  |  |   | Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)  | 0.5                   | 0.49         | 0.48         | 0.47         | 0.46         | 0.45         | 0.44         |
|  |  |   | Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin  | 459,043               | 459,050      | 459,070      | 459,090      | 459,100      | 459,150      | 459,200      |
|  |  |   | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)  | 85.52                 | 85.85        | 86.17        | 86.5         | 86.83        | 87.16        | 87.49        |
|  |  | Meningkatnya Pelayanan pada PPKS  | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)                   | 90                    | 90.1         | 90.2         | 90.3         | 90.4         | 90.5         | 90.5         |
|  |  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)  | 75.17                 | 81           | 81.50        | 80.60        | 80.70        | 80.80        | 80.90        |
|  |  | Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS  | Persentase PSKS yang berdaya (%)  | 80                    | 81           | 82           | 83           | 84           | 85           | 86           |
|  |  | Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                           | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif                | 82                    | 84           | 85           | 88           | 90           | 91           | 93           |
|  |  |   | Persentase Perempuan Korban Kekerasana dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 82                    | 84           | 85           | 88           | 90           | 91           | 93           |
|  |  | Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan   | Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan  | 800                   | 825          | 830          | 835          | 840          | 845          | 850          |

Sumber : Tabel 3.3 Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

| No | Tujuan/Sasaran   | Indikator Utama  | Formulasi Penjelasan  | Penanggung Jawab   | Sumber Data   |
|----|--|--|---|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6   |
| 1  | Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara | Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                   | $\frac{(PPKS-I - PPKS2)}{PPKS-I} \times 100\%$  | -Bidang Rehabilitasi Sosial<br>-Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>-UPT Liposos<br>-Bidang Penanganan Bencana | DTKS Tahun 2024 dan tahun 2025  |
|    |  | Indeks Kedalaman Kemiskinan  | $P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z}{z} \right]^\alpha$                      | -Bidang Rehabilitasi Sosial<br>-Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>-UPT Liposos<br>-Bidang Penanganan Bencana | - Data Kemiskinan Dinas Sosial<br>- Data Kemiskinan BPS<br>- Data DTKS<br>- Data Jumlah Penduduk  |
|    |  | Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin   | $\dot{P} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{n}$   | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial   | Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember   |
|    |  | Indeks Pembangunan Gender  | $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}} \times 100\%$                    | Bidang Pemberdayaan Perempuan  | Data Perempuandan laki-laki pada Bidang Pemberdayaan Perempuan  |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan pada PPKS   | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial                      | Jumlah PPKS terlayani   | -Bidang Rehabilitasi Sosial<br>-Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>-UPT Liposos                               | -Data lansia penerima bantuan alat kesehatan, sembako dan sandang<br>- Data Fakir Miskin penerima<br>-Data klien Liposos<br><br>-Data korban bencana/terdampak bencana penerima bantuan sembako, sandang, dapur umum, dan penerima bantuan bahan bangunan rumah |
|    |  |  | Jumlah PPKS yang terdata  |  |   |
| 3  | Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh  | Persentase PSKS yang Berdaya   | $\frac{\text{Jumlah PSKS yang Diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang terdata}} \times 100\%$ | Bidang Pemberdayaan Sosial   | -Data PSKS yang mendapatkan Bimtek Penguatan SDM<br>- Data PSKS yang terdata  |
| 4  | Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                              | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif               | $\frac{\text{Jumlah Kasus Terlayani}}{\text{Jumlah Laporan Kasus}} \times 100\%$            | Bidang Anak  | -Data kasus kekerasan terhadap anak yang terlayani<br>-Data laporan kasus   |
|    |  | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | $\frac{\text{Jumlah Kasus Terlayani}}{\text{Jumlah Laporan Kasus}} \times 100\%$            | Bidang Perempuan   | -Data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani<br>-Data laporan kasus  |

Sumber Data : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Nomor : 000.8.6.3/631/35.09.315/2025, tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil- hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja Perubahan PD tahun 2025.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2025 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dikarenakan ada penambahan anggaran pada belanja peralatan MBG, dan rehabilitasi UPT Liposos sebagaimana table Perjanjian Kinerja Perubahan berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Jember**

| <b>NO</b> | <b>TUJUAN / SASARAN STRATEGIS</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>TARGET</b> |
|-----------|--|--|---------------|
| (1)       | (2)  | (3)  | (4)           |
| 1         | Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara | Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                                       | 10,1%         |
|           |  | Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin (Rp)  | 459.050,-     |
|           |  | Indeks Kedalaman Kemiskinan  | 0,49          |
| 2         | Meningkatnya Pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                        | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 90,1%         |
| 3         | Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS   | Persentase PSKS yang Berdaya   | 81%           |
| 4         | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | 81            |

|    |   |            |                           |             |
|----|---|------------|---------------------------|-------------|
| 1. | Program Pemberdayaan Sosial                                 | Rp.        | 2.503.773.000,-           | P-APBD 2025 |
| 2. | Program Rehabilitasi Sosial                                 | Rp.        | 7.356.683.600,-           | P-APBD 2025 |
| 3. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                     | Rp.        | 28.578.914.656,-          | P-APBD 2025 |
| 4. | Program Penanganan Bencana                                  | Rp.        | 18.120.705.100,-          | P-APBD 2025 |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | Rp.        | 10.249.791.745.99         | P-APBD 2025 |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>Rp.</b> | <b>66.809.868.111.99.</b> |             |

Sumber: Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2025

#### D. ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN PER SASARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

**a). Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan pada PPKS Didukung oleh**

- Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp. 7.356.683.000,-
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp. 28.578.914.656,-
- Program Penanganan Bencana dengan anggaran Rp. 18.120.705.100,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah **Rp. 54.056.302.756,-** yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Jember.

**b). Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS, didukung oleh** Program Pemberdayaan Sosial Sosial dengan anggaran Rp. 2.503.773.000,- dan yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Jember

**c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah,** di dukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 10.249.791.745.99,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 100 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Jember

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | $\geq 90$                        | Sangat Tinggi                        |      |
| 2. | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |      |
| 3. | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |      |
| 4. | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |      |
| 5. | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran   | Target 2025 | Realisasi 2025 | Tingkat Capaian Kinerja (%) realisasi | Target Akhir Renstra (2029) | Tingkat capaian terhadap target akhir renstra |
|----|---|---|-------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1  | 2   | 3   | 4           | 5              | 6 (5/4 *100%)                         | 7                           | 8 (5/7 *100%)                                 |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan pada PPKS  | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 90.1%       | 67%            | 74%                                   | 90.5                        | 74%   |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS  | Persentase PSKS yang berdaya (%)                                    | 81 %        | 55%            | 67%                                   | 85                          | 67%   |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                | 81          | 76             | 93%                                   | 80.80                       | 94%   |

Sumber Data Realisasi : Data Dinas Sosial Kab Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Jember rata rata mencapai kurang dari 80 % dan masuk dalam kategori cukup tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2025 menunjukkan pencapaian yang tinggi, dengan demikian maka secara umum Dinas Sosial Kabupaten

Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang sosial secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2025 -2029

Penjelasan data realisasi :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan pada PPKS

Berdasarkan data PPKS pada Tahun 2025 perhitungan realisasi Sasaran 1 sebagai berikut :

|  |
|--|
| <b>Formulasi</b>   |
| <b>Perhitungan :</b>   |
| $\frac{\text{Jumlah PPKS yang Terlayani}}{\text{Jumlah PSKS terdata}} = \frac{129.300}{168.304} \times 100 \% = 76 \%$ |

Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanannya PPKS Pemberdayaan Sosial oleh PSKS

|   |
|---|
| <b>Formulasi</b>  |
| <b>Perhitungan :</b>  |
| $\frac{\text{Jumlah PSKS yang Berdaya}}{\text{Jumlah PSKS keseluruhan}} = \frac{5 \text{ Lembaga PSKS}}{8 \text{ Lembaga PSKS}} \times 100\%$ |
| $= 62 \%$   |

Sasaran 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

|  |
|--|
| <b>Formulasi</b>   |
| <b>Perhitungan :</b>   |
| $\frac{\text{Nilai SAKIP Perangkat Daerah}}{81} \times 100 \% = 108\%$ |

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

| Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran   | Realisasi |      |      |      |     | 2025 |
|---|---|-----------|------|------|------|-----|------|
|   |   | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 |     |      |
| Meningkatnya Pelayanan pada PPKS  | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 71%       | 75%  | 90%  | 88%  | 76% |      |
| Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial  | Persentase PSKS yang Berdaya  | 62 %      | 75%  | 80%  | 80 % | 62% |      |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                | 67        | 67   | 69.5 | 76   | 76  |      |

Sumber Data Realisasi : Dinas Sosial Kab Jember

Tabel 3.4

## (Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 - 2025 dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran   | Realisasi Th. 2024 | Realisasi Tahun 2025 | Realisasi Nasional/ Provinsi/ Kabupaten | Ket. (+/-) |
|----|---|---|--------------------|----------------------|---|------------|
| 1  | Meningkatnya Pelayanan pada PPKS  | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 88%                | 76%                  | -                                       | -          |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial  | Persentase PSKS yang Berdaya  | 80%                | 62%                  | -                                       | -          |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                | 76                 | 88.25                | -                                       | -          |

Sumber Data: Realisasi : Dinas Sosial Kab Jember

Realisasi kinerja atas indikator Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, PSKS yang Berdaya, dan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah Tercapai tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6  
Program Pendukung Sasaran Tahun 2025

| PROGRAM KEGIATAN   | ANGGARAN          | REALISASI PER SEPT 2025 |        |
|--|-------------------|-------------------------|--------|
|  |                   | (RP.)                   | (%)    |
| 1  | 2                 | 3                       | 4      |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |                   |                         |        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                  | 66,995,866,445.99 | 12,814,961,962          | 19.13% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 10,249,791,745.99 | 4,666,045,550.00        | 45.52% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 4,369,921,596.80  | 2,586,758,729           | 59.19% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 4,369,921,596.80  | 2,586,758,729           | 59.19% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 1,417,359,000.00  | 284,629,400.00          | 20.08% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 46,224,000        | 1,755,000               | 4%     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 289,703,700       | -                       | 0.00%  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 337,523,800       | 86,838,000              | 25.73% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 618,937,000       | 142,056,500             | 22.95% |
| Belanja Bahan Cetak  | 119,970,500       | 53,824,900              | 44.87% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 5,000,000         | 155,000                 | 67.20% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 469,450,000       | 156,987,200             | 33.44% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 3,164,729,149     | 1,284,208,064           | 40.58% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 3,100,000         | 2,050,000               | 66.13% |

|   |  |                |               |         |
|---|--|----------------|---------------|---------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  | 309,487,749.19 | 90,931,855    | 29.38%  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  | 2,852,141,400  | 1,191,226,209 | 41.77%  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  | 828,332,000    | 353,462,157   | 42.67%  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  | 77,025,000     | 19,070,793    | 24.76%  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |  | 415,000,000    | 125,831,020   | 30.32%  |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  | 80,000,000     | 3,110,000     | 3.89%   |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |  | 256,307,000    | 205,450,344   | 80.16%  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   |  | 2,503,773,000  | 573,020,000   | 22.89%  |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  |  | 2,503,773,000  | 573,020,000   | 22.89%  |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  |  | 2,305,973,000  | 496,720,000   | 21.54%  |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   |  | 197,800,000    | 76,300,000    | 38.57%  |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   |  | 7,356,683,600  | 1,729,450,041 | 23.51%  |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                            |  | 6,961,183,600  | 1,729,450,041 | 24.84%  |
| Penyediaan Alat Bantu   |  | 985,300,000    | 939,071,100   | 95.31%  |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial   |  | 2,064,211,600  | 541,225,891   | 26.22%  |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  | 3,911,672,000  | 249,153,050   | 6.37%   |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial   |  | 395,500,000    | -             | 0.00%   |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial   |  | 395,500,000    | -             | 0.00%   |
| Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota  |  | -              | -             | #DIV/0! |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   |  | 28,578,914,656 | 94,169,000    | 0.33%   |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   |  | 28,578,914,656 | 94,169,000    | 0.33%   |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota  |  | 697,920,000    | -             |         |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  |  | 26,765,794,656 | 90,809,000    | 0.34%   |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  |  | 1,115,200,000  | 3,360,000     | 0.30%   |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA  |  | 18,120,705,100 | 5,727,237,371 | 31.61%  |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   |  | 18,120,705,100 | 5,727,237,371 | 31.61%  |
| Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  |  | 18,120,705,100 | 5,727,237,371 | 31.61%  |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  |  | 185,998,344    | 25,040,000    | 13.46%  |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   |  | 185,998,344    | 25,040,000    | 13.46%  |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   |  | 185,998,344    | 25,040,000    | 13.46%  |

Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan : Pemberdayaan lansia dari target 8 Lembaga terealisasi 1.547 orang, antara lain dalam bentuk kegiatan : pemberdayaan karang werda, LVRI, PWRI, LKS, karang taruna dan peningkatan kapasitas SDM PSKS yaitu bimbingan teknis pada TKSK

Kendala penyebab realisasi tidak mencapai target dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan pada sub kegiatan tersebut, serta kurangnya sinkronisasi dan koordinasi dengan PSKS.

**Dok : Hari Lanjut Usia**



**Dok : Pemberdayaan Lansia**



Peningkatan kapasitas PSKS dengan target 1.500 orang dan terealisasi 3.000 orang, dalam bentuk kegiatan peringatan pemberdayaan lansia melalui peringatan Hari Lanjut Usia (HALUN) dengan diikuti kurang lebih 3000 lansia berdaya di Kabupaten Jember, bertempat di Gedung Serbaguna Jember, rangkaian acara tersebut adalah senam lansia, pemberian hadiah untuk kelompok lansia berprestasi, dan melibatkan pengurus dan anggota karang werda Se-Kabupaten Jember.

***Dok : Peringatan Hari Lanjut Usia***



**Program: Rehabilitasi Sosial**

**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu :

Pemberian bantuan alat kesehatan berupa : kursi roda dan kruk bagi lansia miskin dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup lansia, meningkatkan kualitas hidup lansia dan membantu mereka tetap sehat dan terlibat dalam kehidupan sosial.

***Dok : Pemberian bantuan alkes lansia***

Sub Kegiatan Pemberian, Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial



|        | Uraian Input/ Output  | Satuan | Target          | Realisasi       |
|--------|---|--------|-----------------|-----------------|
| Input  | Jumlah Dana   | Rp     | 1.208.573.000,- | 1.112.351.070,- |
| Output | Jumlah peserta bimbingan fisik mental, spiritual dan sosial kewenangan kab/kota | orang  | 60              | 70              |

Penanganan klien lipososis berupa pelayanan sosial klien yang ditampung di UPT lipososis yaitu : pemberian permakanan, obat-obatan, sandang, penelusuran keluarga , reunifikasi keluarga, pemulangan klien ke daerah asal, rujukan klien ke RSUD/RS Jiwa, dan pelayanan sosial lainnya.

Kendala pelayanan pada klien liposos adalah sarana prasarana yang kurang memadai untuk rumah penampungan klien, karena kapasitasnya tidak dapat menampung jumlah klien yang over load, belum tersedianya ruang klien untuk ODGJ, Penyakit Menular, Lansia, isolasi ODGJ Ekstrim, Ruang Kesehatan dan alat medis penanganan pertama pada klien, rumah singgah, Ruang konseling, ambulance, sarpras kebersihan klien, dan artesis.

**Dok : Pemberian Permakanan pada Klien**



**Dok : Rujukan klien ke RSUD**



**Dok : Reunifikasi Klien**



Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pemberian bantuan kebutuhan dasar berupa bantuan paket sembako, alat kesehatan dan sandang pada penyandang disabilitas, anak yatim, anak PPKS dan lansia miskin, bantuan pelayanan social (rujukan, reunifikasi dan pemulangan ke daerah asal), dan kegiatan HDI (Hari Disabilitas Indonesia) dalam bentuk pelatihan ketrampilan berbasis pemberdayaan bagi disabilitas.

**Dok : Hari Disabilitas Indonesia**



**Dok : Bantuan sembako pada lansia miskin**



**Dok : Bantuan sandang pada anak PPKS**



***Dok : Bantuan alkes pada disabilitas***



***Dok : Rujukan lansia sebatang kara***



**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial

Pemberian bantuan sembako pada fakir miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan pemberian bantuan paket sembako pada fakir miskin sejumlah 300 paket.

**Dok : Pemberian bantuan paket sembako pada fakir miskin**



Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Pemberian bantuan sembako pada LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) adalah untuk membantu anak-anak dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka, dan Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan pemberian bantuan paket sembako pada 67 LKSA di Kabupaten Jember.

**Dok : Pemberian bantuan paket sembako pada LKSA**



## **Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial**

### **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota

Dinas Sosial Kabupaten Jember bersama dengan PUSKESOS telah melaksanakan verval DTKS pada 1.043.765 jiwa, tujuan dilaksanakannya verval data tersebut adalah memperbaiki atau mengupdate DTKS di aplikasi SIKS-NG, memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk dalam kriteria miskin dan layak mendapatkan bantuan sosial, menentukan seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial, dan menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran.

#### ***Dok : Kegiatan sosialisasi verval DTKS***



Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan yang dilaksanakan adalah BLT DBHCHT, dan merupakan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). DBHCHT merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuan pemberian BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor tembakau. BLT DBHCHT juga bertujuan untuk: membantu pemulihan perekonomian daerah, Memberikan rasa keadilan, Meningkatkan motivasi buruh tani untuk tetap beraktivitas, Mengurangi beban buruh tani dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan pemberian BLT DBHCHT dengan target 73.500 orang dan terealisasi sejumlah 69.519 orang yang masing-masing mendapatkan BLT sebesar Rp. 400.000,-. Tidak memenuhi target dikarenakan calon penerima BLT tersebut ada yang meninggal, pindah alamat dan Alamat tidak diketemukan.

**Dok : pemberian BLT DBHCHT**



Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat bersama dengan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Jember bertempat di Gedung B Jalan Tawes, bentuk kegiatan ini adalah bazar yang diikuti oleh PKH graduatif, dan merupakan salah satu wujud pecan pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kabupaten Jember

**Dok : Pemberdayaan ekonomi KPM PKH**



**Program : Penanganan Bencana**

**Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan**

Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan bantuan kebutuhan dasar pada kelompok rentan/masyarakat terdampak bencana/korban bencana, antara lain : bantuan permakanan, sandang, bahan bangunan rumah, paket sembako, dapur umum darurat bencana dan bantuan lainnya

***Dok : Pemberian bantuan masyarakat rentan/korban bencana***



**Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

**Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Dinas Sosial Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan pemeliharaan di 15 (lima belas) Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Jember, antara lain pengecatan TMP, perbaikan tembok dan nisan TMP yang sudah tidak layak, dan perawatan lainnya. Untuk kegiatan hari-hari besar nasional dipusatkan di TMP Patrang, antara lain : kerja bakti bersama Kodim 0824/Jember dan jajaran lainnya, yang merupakan persiapan kegiatan renungan malam dan upacara dan kegiatan tabur bunga.

***Dok : pelaksanaan upacara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka menghormati jasa para pahlawan***



***Dok : petugas TMP membersihkan Taman Makam Pahlawan***



#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Jember berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 66.995.866.445.99,- , melaksanakan 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Sasaran   | Realisasi Th. 2024 | Realisasi Tahun 2025 | Realisasi Nasional/ Provinsi/ Kabupaten | Ket. (+/-) |
|----|---|---|--------------------|----------------------|---|------------|
| 1  | Meningkatnya Pelayanan pada PPKS  | Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 88%                | 76%                  | -                                       | -          |
| 2  | Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial  | Persentase PSKS yang Berdaya  | 80%                | 62%                  | -                                       | -          |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                | 76                 | 88.25                | -                                       | -          |

## **E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :







## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 4 (empat) Indikator yang diperjanjikan dalam PK Perubahan Tahun 2025, sebanyak 4 (empat) indikator mencapai target dengan kategori cukup tinggi.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target pada Semester I, yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan, adalah sebagai berikut :

### **A. Faktor Pendukung Keberhasilan adalah :**

- Tersedianya anggaran pada bidang sekretariat, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, UPT Liposos dan bidang bencana
- Tersedianya SDM dan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan
- Penentuan Identifikasi kebutuhan yang tepat sasaran
- Penentuan jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan calon penerima bantuan
- Kerja sama yang baik Bidang Rehabilitasi Sosial dengan pihak lain/stakeholder dalam pendistribusian bantuan

### **B. Faktor Penghambat Keberhasilan adalah :**

- Perencanaan beberapa belanja barang dan jasa kurang matang, tidak sesuai kebutuhan riil, sehingga anggaran tidak direalisasikan
- Revisi berulang pada rencana kegiatan, sehingga kegiatan tidak sesuai jadwal dan realisasi belanja tidak maksimal
- Pelaksanaan belanja barang dan jasa dan belanja modal lebih banyak di laksanakan pada TW III
- Pengajuan SK Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Maret 2025 sehingga kegiatan pemberian bantuan belum bisa di laksanakan pada TW 1
- Kurangnya SDM untuk penyusunan SPJ, karena lebih banyak difungsikan untuk pengiriman bantuan
- Dalam pendistribusian bantuan kesulitan mencapai lokasi penerima manfaat, terutama di daerah terpencil
- Data calon penerima bantuan belum akurat

### **C. Rencana Tindak Lanjut atas Permasalahan Pada Program Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana adalah :**

- Menyusun anggaran berbasis data kebutuhan
- Verval Data calon penerima bantuan dilaksanakan awal tahun
- Pengajuan SK Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Januari/Februari sehingga kegiatan pemberian bantuan bisa di laksanakan lebih awal

- Pergeseran anggaran Pada PABD untuk anggaran yang tidak digunakan pada belanja lain sehingga realisasi bisa dilaksanakan anggaran yang
- Kedepan pelaksanaan belanja barang dan jasa dan belanja di laksanakan pada TW I akhir smpai dengan TW III, sehingga TW IV hanya melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan
- Penambahan SDM untuk penyusunan SPJ
- Dalam pendistribusian bantuan bekerja sama dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa/Pilar/Pendamping Sosial sebagai pemangku wilayah yang paham medan/lokasi pendistribusian bantuan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2025 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi, dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2026.

Jember, 24 September 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Jember



Akhmad Helmi Luqman, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760507 199602 1 004

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- 1. RKT**
- 2. RENCANA AKSI**
- 3. MONEV**
- 4. IKU**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**  
 Tahun : 2025

| Sasaran Strategis Kabupaten   |   |         | Tujuan Perangkat Daerah                                 |   |        | Sasaran Perangkat Daerah  |   |        | Program                                 |   |   |
|---|---|---------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|---|
| Uraian Sasaran  | Indikator   | Target  | Uraian Tujuan   | Indikator                               | Target | Uraian Sasaran  | Indikator   | Target | Nomenklatur Program                     | Sasaran / Outcome Program                       | Kinerja   |
|   |   |         |   |   |        |   |   |        |   |   | Indikator Program   |
| 1. Menurunnya Beban Pengeluaran Penduduk Miskin<br>2. Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin | 1. Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 8.64%   | Menurunnya PPKS dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara | 1.Persentase Penurunan PPKS             | 10.1   | Meningkatnya Pelayanan pada PPKS  | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial | 90.10% | Program Rehabilitasi Sosial             | Meningkatnya rehabilitasi sosial                | Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial   |
|   | 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan  | 0.91%   |   | 2.Indeks Kedalaman Kemiskinan           | 0.49%  | Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS  | Persentase PSKS yang Berdaya                                    | 81%    | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial    | Persentase PPKS yang Menerima Perlindungan Jaminan Sosial   |
|   | 3. Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin                               | 459.050 |   | 3. Rata-Rata Pendapatan Penduduk Miskin |        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                    | 76     | Program Penanganan Bencana              | Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana | Persentase Korban Bencana Alam , Sosial/Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar setelah Tanggap Darurat Bencana |



**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN : 2025**

| Tujuan  | Indikator Tujuan   | Sasaran Strategis                   | Indikator Sasaran   | Program                     |                                  |   |                | Kegiatan  |   |   |                | Sub Kegiatan             |  |  |                   |   |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|--------------------------|--|--|-------------------|---|
|   |  |                                     |   | Nomenklatur Program         | Sasaran / Outcome Program        | Indikator Kinerja Program                           | Target tahunan | Nomenklatur Kegiatan  | Sasaran/ Output Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Target Tahunan | Nomenklatur Sub Kegiatan | Sasaran/ Output Sub Kegiatan   | Kinerja  |                   | Anggaran  |
|   |  |                                     |   |                             |                                  |   |                |   |   |   |                |                          |  | Indikator Kinerja Sub Kegiatan   | target (bulan an) | target (bulanan)  |
| 1   | 2  | 3                                   | 4   | 5                           | 6                                | 7   | 8              | 9   | 10  | 11  | 12             | 13                       | 14   | 15   | 16                | 17  |
| Menurunnya PPKS dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara | 1. Persentase Penurunan PPKS<br>2. Indeks Kedalaman Kemiskinan<br>3. Indeks Pembangunan Gender | 1. Meningkatnya Pelayanan pada PPKS | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Program Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial | 90.10%         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penayandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak lanjut usia dan gepeng yang dijangkau | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 89%            | Penyediaan Alat Bantu    | Terlaksananya pemberian alat bantu kesehatan pada penyandang disabilitas terlantar, anak lanjut usia terlantar, dan gepeng | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 365 orang         | Jan : 0,-<br>Feb : Rp. 952. 300.000,-<br>Maret : Rp. 4000.000,-<br>April: Rp. 4000.000,-<br>Mei: Rp. 4000.000,-<br>Juni: Rp. 21.000.000,-<br>Juli: 0,-<br>Agustus: 0,-<br>Sept: 0,-<br>Okt : 0,-<br>Nov: 0,-<br>Des : 0,- |



|  |  |  |  |   |  |   |        |  |  |  |              |   |   |  |              |   |
|--|--|--|--|---|--|---|--------|--|--|--|--------------|---|---|--|--------------|---|
|  |  |  |  |   |  |   |        | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar pada keluarga miskin, LKS dan PPKS lainnya di luar panti | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi | 89%          | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 1.050 Orang  | Jan : 0,-<br>Feb : 0,-<br>Maret :Rp. 382.700.000,-<br>April: 0,-<br>Mei: 0,-<br>Juni: Rp.12.800.000,-<br>Juli: 0,-<br>Agustus: 0,-<br>Sept: 0,-<br>Okt : 0,-<br>Nov: 0,-<br>Des : |
|  |  |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase PPKS yang Menerima Perlindungan Jaminan Sosial | 90.10% | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya verifikasi dan validasi data PPKS  | Jumlah PPKS yang terdata dan terintegrasi  | 930.410 Jiwa | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                              | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 930.410 Jiwa | Jan : 0,-<br>Feb : 0,-<br>Maret : 0,-<br>April: 0,-<br>Mei: 0,-<br>Juni: Rp.697.920.000,-<br>Juli: 0,-<br>Agustus: 0,-<br>Sept: 0,-<br>Okt : 0,-<br>Nov: 0,-<br>Des :             |



|  |  |   |                                     |                             |   |   |        |  |  |  |     |  |   |  |              |  |
|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------|--|--|--|-----|--|---|--|--------------|--|
|  |  |   |                                     | Program Penanganan Bencana  | Meningkatnya Bantuan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan setelah tanggap Darurat Bencana | 90.10% | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                 | Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial | 88% | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | Terlaksananya bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana alam dan sosial              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 38.850 Orang | Jan : 50.000.000,-<br>Feb : Rp.73.750.000,-<br>Maret :Rp. 100.000.000,-<br>April: Rp. 7.600.148.959,-<br>Mei: Rp. 28.000.000,-<br>Juni: Rp.833.579.400,-<br>Juli: 0,-<br>Agustus: 0,-<br>Sept: 9.435.226.741,-<br>Okt : 0,-<br>Des : 0,- |
|  |  | <b>2.Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS</b> | <b>Persentase PSKS yang Berdaya</b> | Program Pemberdayaan Sosial | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial pada PSKS                  | Persentase Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial                                   | 81.00% | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan SDM PSKS   | Persentase PSKS yang dibina  | 80% | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota   | 8 lembaga    | Jan : 0,-<br>Feb : Rp. 1.313.000,-<br>Maret :Rp. 295.000.000,-<br>April: Rp. 1.376.260.000,-<br>Mei: Rp.198.000.000,-<br>Juni: Rp.2000.000,-<br>Juli: 100.000.000,-<br>Agustus: 0,-<br>Sept: 333.400.000,-<br>Okt : 0,-<br>Des : 0,-     |

|  |  |   |                              |    |   |  |                    |   |  |   |  |   |  |   |  |  |
|--|--|---|------------------------------|----|---|--|--------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
|  |  |   |                              |    |   |  |                    |   |  |   | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang Mendapatkan Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 31 Orang  | Jan : 0,-<br>Rp.<br>Maret : Rp.<br>April: Rp.<br>Mei: Rp.<br>Rp.198.000.000,-<br>Juni:<br>Julli:<br>Agustus: Rp.<br>0,-<br>Okt : 0,-<br>0,-<br>0,- | Feb :<br>1.313.000,-<br>295.000.000,-<br>1.376.260.000,-<br>198.000.000,-<br>Rp.2000.000,-<br>100.000.000,-<br>333.400.000,-<br>Sept:0,-<br>Nov:<br>Des :  |
|  |  | <b>3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</b> | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 76 | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | 1. Presentase indikator program yang tercapai<br>2. Persentase realisasi anggaran<br>3. Indeks Profesional ASN | 100%<br>100%<br>78 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya laporan pertanggung jawaban keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 orang   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 orang   | Jan : 306.828.714.97,-<br>Feb : Rp. 306.828.714.97,-<br>Maret : Rp. 517.050.180.94,-<br>April: Rp. 517.068.390.94,-<br>Mei: Rp. 403.435.163.97,-<br>Juni: Rp.447.068.007.97<br>Juli: 202.585.420.72<br>Agustus: Rp. 202.585.420.72,-<br>Sept: Rp. 858.714.520,-<br>Okt : 202.586.220.72<br>Nov: 202.585.420.72<br>Des : 202.585.420.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |   |         |  |  |  |         |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|---------|--|--|--|---------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket Penyediaan Barang dan Jasa | i Paket | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | i Paket | Jan : 0,-<br>Rp.23.112.000,-<br>Maret<br>April: Rp0,-<br>Rp.<br>Juni:<br>Juli:0<br>Rp.0,-<br>Sept: Rp. 0,-<br>Rp.0<br>Rp.0,-<br>Rp.0,- | Feb :<br>:Rp.0,-<br>Mei:<br>0,-<br>Rp.23.112.000,-<br>Agustus:<br>Okt :<br>Nov:<br>Des :                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |   |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                     | i Paket | Jan : 0,-<br>Rp0,-<br>Maret<br>April: Rp0,-<br>Rp,<br>Juni: Rp 0,-<br>Rp.:0<br>Rp.0,-<br>Sept:<br>Okt : 0<br>0                         | Feb :<br>:Rp.11,779,800,-<br>Mei:<br>80,464,600,-<br>Juli<br>Agustus:<br>Rp.189,459,300,-<br>Nov:<br>Des : 0 |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |                   |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|-------------------|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Terlaksana<br>nnya<br>Laporan<br>Pengadaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>pengadaan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Permerinta<br>h Daerah | 4<br>Laporan  | Pengada<br>an<br>Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Banguna<br>n<br>Lainnya | Terlaksana<br>nnya<br>Pembangu<br>nan<br>Gedung<br>Kantor        | Jumlah Unit<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya yang<br>disediakan | 3 unit            | Jan : 0,-<br>Rp.0,-<br>0,-<br>Rp.0,-<br>Rp,<br>Juni: Rp 0,-<br>Rp.:0-<br>Rp.0,-<br>Sept: Rp<br>Okt : 0<br>0                          | Feb :<br>Maret :Rp<br>April:<br>Mei:<br>165.100.000,-<br>Juli<br>Agustus:<br>304.350.000,-<br>Nov:<br>Des : 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                  | Terlaksana<br>nya laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                         | Jumlah<br>laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                       | 12<br>Laporan | Penyedi<br>aan Jasa<br>Surat<br>Menyura<br>t                         | Terpenuhi<br>nya Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                      | 12<br>Lapora<br>n | Jan : 0,-<br>Rp.3.100.000,-<br>Maret :Rp<br>April: Rp.0,-<br>Rp,<br>Juni: Rp 0,-<br>Rp.:0-<br>Rp.0,-<br>Sept: Rp 0,-<br>0<br>Des : 0 | Feb :<br>0,-<br>Mei:<br>0,-<br>Juli<br>Agustus:<br>Okt :<br>Nov: 0  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |            |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Jan : 30.000.000,-<br>Feb : Rp. 0,-<br>Maret :Rp 76.270.483,08,-<br>April: Rp.154.356.727,-<br>Mei: Rp, 10.000.000,-<br>Juni: Rp 38.860.539,11,-<br>Juli Rp.:0-<br>Agustus: Rp.0,-<br>Sept: Rp 0,-<br>Des : 0<br>Okt :<br>Nov: 0   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                   | 12 Laporan | Jan : 180.610.000,-<br>Feb : Rp. 447.246.100,-<br>Maret :Rp 496.425.700,-<br>April: Rp.184.810.000,-<br>Mei: Rp, 262.644.000,-<br>Juni: Rp 272.359.000,-<br>Juli Rp.:109.434.000-<br>Agustus: Rp.141.112.000,-<br>Sept: Rp 277.030.600,-<br>Okt : Rp.181.110.000,-<br>Nov: Rp.167.610.000,-<br>Des : 131.750.000,- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |           |   |   |  |        |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------|---|---|--|--------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 Laporan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | Jan : Rp.10.000.000,-<br>Feb : Rp. 6.000.000,-<br>Maret :Rp 55.025.000,-<br>April: Rp.6.000.000,-<br>Mei: Rp, 0,-<br>Juni: Rp 0,-<br>Rp.: 0-<br>Rp. 0,-<br>Sept: Rp 0,-<br>Rp.0,-<br>Rp. 0,-                                       | Juli :<br>Agustus:<br>Okt :<br>Nov:<br>Des : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya  | 9 Unit | Jan : Rp7.500.000,-<br>Feb : Rp.70.000.000,-<br>Maret :Rp 45.000.000,-<br>April: Rp.15.000.000,-<br>Mei: Rp, 15.000.000,-<br>Juni: Rp 185.000.000,-<br>Juli Rp.: 0-<br>Rp. 0,-<br>Sept: Rp 97.500.000,-<br>Okt : Rp.0,-<br>Rp. 0,- | Agustus:<br>0,-<br>Nov:<br>Des :             |



|  |  |   |                                      |     |  |                         |        |  |   |  |     |  |   |   |        |   |
|--|--|---|--------------------------------------|-----|--|-------------------------|--------|--|---|--|-----|--|---|---|--------|---|
|  |  | 4.Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan | Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan | 826 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Jumlah TMP yang Dirawat | 15 TMP | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Terlaksananya Taman Makam Pahlawan yang terpelihara | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara | 85% | Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Terlaksananya Pemeliharaan Makam pada Taman Makam Pahlawan yang Terpenuhi | Terlaksananya Pemeliharaan Makam pada Taman Makam Pahlawan yang Terpenuhi | 15 TMP | Jan : Rp 800.000,00<br>Feb : Rp. 0,-<br>Maret :Rp 0,-<br>April: Rp. 16.450.000,-<br>Mei: Rp, 4.632.000,00<br>Juni: Rp 77.870.700,00<br>Juli Rp.: .200.000,00<br>Agustus: Rp. 8.536.000,00<br>Sept: Rp 60.661.644,00<br>Okt : 1.616.000,00<br>Nov: Rp. 1.616.000,00<br>Des : Rp. 0,- |
|--|--|---|--------------------------------------|-----|--|-------------------------|--------|--|---|--|-----|--|---|---|--------|---|

**MONITORING RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER  
TAHUN : 2025**

| Tujuan  |   |  |           |           | Sasaran        |   | Program                     |                                  |   |                |   |  |  |                |                   |                    | Sub Kegiatan             |   |  |                  |                     |                   |                  | Faktor Pendukung Keberhasilan | Faktor Penghambat / Kendala | Rencana Tindak Lanjut  |   |  |
|---|---|--|-----------|-----------|----------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|----------------|---|--|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
| Uraian Tujuan   | Indikator Tujuan  | Target                                     | Realisasi | % Capaian | Uraian Sasaran | Indikator Sasaran   | Nomenklatur Program         | Sasaran / Outcome Program        | Indikator Kinerja Program                           | Target tahunan | Nomenklatur Kegiatan  | Sasaran/ Output Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target tahunan | Realisasi tahunan | % Capaian Kegiatan | Nomenklatur Sub Kegiatan | Sasaran / Output Sub Kegiatan   | Kinerja  |                  |                     |                   | Anggaran (Rp)    |                               |                             |  |   |  |
|   |   |  |           |           |                |   |                             |                                  |   |                |   |  |  |                |                   |                    |                          |   | Indikator Kinerja Sub Kegiatan   | Target (bulanan) | Realisasi (bulanan) | % Capaian Kinerja | Target (bulanan) |                               |                             |  | Realisasi (bulanan)   | % Capaian Anggaran   |
| Menurunnya PPKS dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara | Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara | <b>1. Meningkatkan Pelayanan pada PPKS</b> |           |           |                | Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Program Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya rehabilitasi sosial | Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial | 90.10%         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangga Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau | 89             | 85                | 95.51              | Penyediaan Alat Bantu    | Terlaksananya pemberian alat bantu kesehatan pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /Kota | 365 orang        | 275 orang           | 75%               | 960,300,000      | 939,071,100                   | 97.79                       | - Penentuan Identifikasi kebutuhan yang tepat sasaran - Penentuan jenis alat bantu yang sesuai - Kerja sama yang baik Bidang Rehabilitasi Sosial dengan pihak lain/stakeholder dalam pendistribusian bantuan | Dalam pendistribusian bantuan kesulitan mencapai lokasi/kondisi penerima manfaat, terutama di daerah terpencil - Kurangnya tenaga/SDM untuk pendistribusian bantuan | -Bekerja sama dengan wilayah/Kecamatan/Kelurahan/Desa/PPKS dalam pendistribusian bantuan untuk mengetahui lokasi/kondisi daerah penerima bantuan |





|  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |            |   |  |  |     |  |  |   |   |   |                     |                         |            |                    |                   |      |  |   |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|------------|---|--|--|-----|--|--|---|---|---|---------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------------|------|--|---|--|
|  |  |   |  |  |  |  | Progra<br>m<br>Penang<br>anan<br>Bencan<br>a | Mening<br>katnya<br>Bantua<br>n dan<br>Perlind<br>ungan<br>Sosial<br>Korban<br>Bencan<br>a | Persent<br>ase<br>Korban<br>Bencan<br>a Alam,<br>Sosial<br>dan/at<br>au Non<br>Alam<br>Yang<br>Terpen<br>uhi<br>Kebutu<br>han<br>Dasar<br>pada<br>Saat<br>dan<br>setelah<br>tangga<br>p<br>Darurat<br>Bencan<br>a | 90.1<br>0% | Kegiatan<br>Perlindu<br>ngan<br>Sosial<br>Korban<br>Bencana<br>Alam<br>dan<br>Sosial<br>Kabupat<br>en/Kota  | Terlaksana<br>nya<br>Penangan<br>an Khusus<br>bagi<br>Kelompok<br>Rentan<br>Kewenanga<br>n<br>Kabupaten<br>/Kota | Persen<br>tase<br>terpen<br>uhinya<br>bantua<br>n<br>kebutu<br>han<br>dasar<br>bagi<br>masyar<br>akat<br>korban<br>bencan<br>a alam<br>dan<br>sosial | 88% |  |  | Penangan<br>an Khusus<br>bagi<br>Kelompok<br>Rentan   | Terlaksa<br>nanya<br>bantuan<br>dasar<br>kebutu<br>han<br>masyara<br>kat<br>korban<br>bencana<br>alam<br>dan<br>sosial                            | Jumlah<br>Orang<br>yang<br>Mendapat<br>kan<br>Penangan<br>an Khusus<br>bagi<br>Kelompok<br>Rentan<br>Kewenang<br>an<br>Kabupaten<br>/Kota | 28.85<br>0<br>Orang | 18.0<br>00<br>Oran<br>g | 62%        | 18,120,7<br>05,100 | 5,727,2<br>37,371 | 31.6 | -<br>Penentuan<br>Identifikasi<br>kebutuhan<br>yang tepat<br>sasaran -<br>Penentuan<br>jenis<br>kebutuhan<br>dasar yang<br>sesuai<br>-Kerja sama<br>yang baik<br>Bidang<br>Penangan<br>an Bencana<br>dengan<br>pihak<br>lain/stakeh<br>older dalam<br>pendistribusi<br>an<br>bantuan | Dalam<br>pendistr<br>ibusian<br>bantuan<br>kesulita<br>n<br>-<br>mencapai lokasi<br>penerima<br>manfaat<br>,<br>terutama di<br>daerah terpeci<br>l<br>-<br>Kurangn<br>ya<br>tenaga/<br>SDM<br>untuk<br>pendistr<br>ibusian<br>bantuan | -Bekerja sama dengan<br>wilayah/Kecamatan/Ke<br>lurahan/Desa/PSKS<br>dalam pendistribusian<br>bantuan untuk<br>mengetahui daerah<br>lokasi/kondisi penerima<br>bantuan |
|  |  | 2.Menin<br>gkatnya<br>Pelayan<br>an<br>Pember<br>dayaan<br>Sosial<br>oleh<br>PSKS | Caku<br>pan<br>Laya<br>nan<br>Taman<br>Mak<br>am<br>Pahla<br>wan |  |  |  | Progra<br>m<br>Pember<br>dayaan<br>Sosial    | Mening<br>katnya<br>Pember<br>dayaan<br>Sosial<br>pada<br>PSKS                             | Persent<br>ase<br>Lembaga<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Sosial<br>yang<br>Mening<br>kat<br>Kualitas<br>nya<br>Dalam<br>Pelayan<br>an<br>Sosial  | 81.0<br>0% | Peningk<br>atan<br>Kemamp<br>uan<br>Potensi<br>Sumber<br>Kesejaht<br>eraan<br>Sosial<br>Kelemba<br>gaan<br>Masyara<br>kat<br>Kewena<br>ngan<br>Kabupat<br>en/Kota | Terlaksana<br>nya<br>Peningkata<br>n<br>SDM<br>PSKS  | Persen<br>tase<br>PSKS<br>yang<br>dibina   | 80% |  |  | Peningkat<br>an<br>Kemampu<br>an<br>Potensi<br>Sumber<br>Kesejaht<br>eraan<br>Sosial<br>Kelembag<br>aan<br>Masyarak<br>at<br>Kewenang<br>an<br>Kabupate<br>n/Kota | Terlaksa<br>nanya<br>Bimtek<br>Peningk<br>atan<br>Kapasita<br>s<br>Lembaga<br>Kesejaht<br>eraan<br>Sosial<br>Kewena<br>ngan<br>Kabupat<br>en/Kota | Jumlah<br>Lembaga<br>Kesejaht<br>eraan<br>Sosial<br>yang<br>Meningkat<br>Kapasitasn<br>ya<br>Kewenang<br>an<br>Kabupaten<br>/Kota         | 8<br>lembaga        | 5<br>Lembaga            | 62.5<br>0% | 2,305,97<br>3,000  | 496,720<br>,000   | 22   | -SDM<br>Lembaga<br>yang siap<br>diberikan<br>pelatihan/B<br>imtek  | -Belum<br>maksim<br>alnya<br>bimtek<br>Lembaga<br>PSKS<br>dikaren<br>akan<br>beberapa<br>faktor<br>(anggaran,<br>SDM,<br>koordin<br>asi yang<br>kurang<br>antara<br>Bidang<br>Pember<br>dayaan<br>Sosial<br>dengan<br>pSKS)           | _Meningkatkan<br>koordinasi yang baik<br>dengan PSKS<br>-Bekerjasama dengan<br>pihak lain untuk<br>Bimtek PSKS (Dinas<br>Sosial Propinsi dan<br>BLK)                   |













**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Tawes Nomor 306, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68133  
Telepon (0331) 487766

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR : 000.8.6.3/ 631/35.09.315/2025**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  - 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jember  
pada tanggal: 23 September 2025

  
**AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760507 199602 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS BUNDAK PEMBERDAYAAN PEMERUPAN DAN PERLEMBUHAN ANAK KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020**

| No | Tujuan/Batasan   | Indikator Utama   | Formulasi Perhitungan  | Pemanggung Jawab  | Sumber Data  |
|----|--|---|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |
| 1  | Peningkatan Pelayanan Keadilan Sosial (PKS) dan Peningkatan UMSI | Perentase Peranan Komunitas Pelayanan Keadilan Sosial (PKS)                         | $\frac{Jumlah\ PKS\ yang\ terlayani}{Jumlah\ PKS} \times 100\%$  | -Ruang Keadilan Sosial<br>-Ruang Perencanaan dan Jember Sosial<br>-Ruang UMSI<br>-Ruang Pelayanan Bincang | -DPS Tahun 2021 dan tahun 2020   |
|    |  | Indeks Ketahanan Komunitas  | $IKK = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^q \left[ \frac{x_j}{x} \right]^p$  | -Ruang Keadilan Sosial<br>-Ruang Perencanaan dan Jember Sosial<br>-Ruang UMSI<br>-Ruang Pelayanan Bincang | -Data Kemitraan Dinas Sosial<br>-Data Kemitraan DPS<br>-Data UMSI<br>-Data Jumlah Produk   |
|    |  | Kategori Pendapat Perilaku Masyarakat   | $\bar{p} = \frac{\sum p_i}{n}$   | -Ruang Perencanaan dan Jember Sosial  | -Data jumlah produk masyarakat Kabupaten Jember  |
|    |  | Indeks Pemberdayaan Gender  | $\frac{PSL + PM \text{ perempuan}}{PSL + PM}$  | -Ruang Pemberdayaan Perempuan   | -Data Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Ruang Pemberdayaan Perempuan   |
| 2  | Peningkatan UMSI   | Perentase PKS yang Mendapatkan Pelayanan Keadilan Sosial                            | $\frac{Jumlah\ PKS\ terlayani}{Jumlah\ PKS\ yang\ terlayani} \times 100\%$   | -Ruang Keadilan Sosial<br>-Ruang Perencanaan dan Jember Sosial<br>-Ruang UMSI                             | -Data hasil pelayanan keadilan dan keadilan, ombuds dan sedang<br>-Data hasil pelayanan keadilan dan keadilan<br>-Data hasil pelayanan keadilan dan keadilan |
| 3  | Peningkatan Pemberdayaan Sosial dan                              | Perentase PKS yang terlayani  | $\frac{Jumlah\ PKS\ yang\ terlayani}{Jumlah\ PKS\ yang\ terlayani} \times 100\%$   | -Ruang Pemberdayaan Sosial  | -Data PKS yang mendapatkan akses pelayanan<br>-Data PKS yang terlayani   |
| 4  | Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak                      | Perentase Anak Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak                         | $\frac{Jumlah\ Anak\ Korban\ Kekerasan\ terhadap\ Perempuan\ dan\ Anak}{Jumlah\ Anak\ Korban\ Kekerasan\ terhadap\ Perempuan\ dan\ Anak} \times 100\%$   | -Ruang Anak   | -Data hasil pelayanan keadilan dan keadilan yang melayani<br>-Data hasil pelayanan keadilan dan keadilan   |
|    |  | Perentase Perempuan Korban Kekerasan dan DPRG yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | $\frac{Jumlah\ Perempuan\ Korban\ Kekerasan\ dan\ DPRG\ yang\ Mendapatkan\ Layanan\ Komprehensif}{Jumlah\ Perempuan\ Korban\ Kekerasan\ dan\ DPRG\ yang\ Mendapatkan\ Layanan\ Komprehensif} \times 100\%$ | -Ruang Perempuan  | -Data hasil pelayanan keadilan dan keadilan yang melayani<br>-Data hasil pelayanan keadilan dan keadilan   |

